

Membaca Kuasa dan Ideologi dalam Berita Kenaikan Tunjangan DPR

Sinta Nuraini Fadzila¹, Haris Shofiyuddin²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya²
sintanuraini643@gmail.com
harishshofiyuddin@uinsa.ac.id

Abstract:

This study examines media discourse surrounding the policy of increasing allowances for members of the Indonesian House of Representatives (DPR) during an economic crisis, using Norman Fairclough's critical discourse analysis approach. The data consists of three news texts from Kompas.com, focusing on how the media frames the DPR's stance, public responses, and expert opinions. The research method is descriptive qualitative with three stages of analysis: (1) text dimension to reveal linguistic choices, structure, and style; (2) discourse dimension to explore text production, distribution, and consumption; and (3) sociocultural dimension to interpret power relations and ideology embedded within the texts. The findings show that each news text emphasizes different discourse orientations. The first text legitimizes DPR's policy through formal-institutional narratives. The second text highlights criticism of the policy's injustice by pointing out the people's economic burden. Meanwhile, the third text expands the critique by situating DPR's policy within the context of political crisis and public distrust. These discourses reveal unequal power relations between political elites and society, as well as the interplay of competing ideologies involving the state, the media, and the people. This study concludes that media coverage does not merely convey information but also constructs meaning that influences public perception. Critical discourse analysis demonstrates how language in news texts functions as a tool of both legitimization and resistance toward state policies.

Keywords: Critical discourse analysis; Online media; DPR; Ideology; Representation

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji wacana pemberitaan mengenai kebijakan kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah krisis ekonomi melalui analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Data penelitian berupa tiga teks berita dari Kompas.com dengan fokus pada bagaimana media membingkai sikap DPR, respons masyarakat, dan pandangan pengamat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan analisis, yaitu (1) dimensi teks untuk mengungkap pilihan bahasa, struktur, dan gaya; (2) dimensi wacana untuk menelaah proses produksi, distribusi, serta konsumsi teks; dan (3) dimensi sosio kultural untuk memahami relasi kuasa dan ideologi yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap teks berita memiliki penekanan wacana berbeda. Berita pertama menampilkan legitimasi terhadap DPR melalui narasi formal-institusional. Berita kedua menyuarakan kritik atas ketidakadilan kebijakan, menyoroti beban ekonomi rakyat. Sementara itu, berita ketiga

memperluas kritik dengan menempatkan kebijakan DPR dalam konteks krisis politik dan krisis kepercayaan publik. Ketiga teks memperlihatkan relasi kuasa yang timpang antara elit politik dan masyarakat, serta ideologi yang saling berhadapan antara kepentingan negara, media, dan rakyat. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk konstruksi makna yang berpengaruh terhadap persepsi publik. Analisis wacana kritis membuka pemahaman bahwa bahasa dalam teks berita dapat menjadi alat legitimasi maupun resistensi terhadap kebijakan negara.

Kata kunci: Analisis wacana kritis; Media Online; DPR; Ideologi, Representasi

PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, membentuk opini, serta merepresentasikan realitas sosial. Melalui bahasa, media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian fakta, tetapi juga sebagai agen yang dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa. Dalam konteks pemberitaan, pilihan kata, struktur kalimat, hingga strategi wacana yang digunakan oleh media memiliki kekuatan untuk mengonstruksi makna tertentu. Oleh karena itu, penelitian terhadap teks media menjadi penting untuk memahami bagaimana realitas sosial diproduksi, direpresentasikan, dan dipengaruhi oleh ideologi serta relasi kuasa tertentu.

Perkembangan teknologi semakin pesat, sekarang berbagai peristiwa mudah dijangkau dan dibaca melalui gawai. Salah satunya yaitu media pemberitaan seperti Kompas.com yang merupakan salah satu portal berita daring terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Media ini berada di bawah naungan Kompas Gramedia, sebuah kelompok usaha yang telah lama berkecimpung dalam dunia pers nasional. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, Kompas.com hadir sebagai salah satu pelopor media online di Indonesia yang konsisten menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan beragam, mulai dari isu politik, ekonomi, sosial, hingga gaya hidup. Dengan reputasi yang kuat sebagai media arus utama, Kompas.com tidak hanya menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas, tetapi juga berperan dalam membentuk opini publik melalui pilihan diksi, struktur pemberitaan, serta cara membingkai isu-isu tertentu. Seperti pemberitaan kenaikan tunjangan DPR yang sedang hangat dibicarakan. Kompas.com memberitakan dengan sebagian menekankan pada legitimasi dari pihak DPR, sementara yang lain mengangkat suara kritis masyarakat

dan akademisi. Perbedaan ini menunjukkan adanya tarik-menarik wacana yang tidak hanya merepresentasikan fakta, melainkan juga memuat relasi kuasa dan ideologi.

Fenomena kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2025 menimbulkan polemik dalam masyarakat. Karena rencana tersebut hadir di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi, naiknya pajak, harga kebutuhan bahan pokok naik, dan sulitnya lapangan pekerjaan. Meskipun rencana tersebut berawal dari tunjangan rumah yang dialokasikan karena kondisi rumah dinas yang tidak layak huni. Namun, masyarakat dan akademisi merasa sebaiknya kenaikan tunjangan tersebut dialokasikan kepada masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang sedang krisis ekonomi. Keputusan DPR ini memunculkan reaksi intens berupa demonstrasi di berbagai daerah, kritik dari akademisi, serta gelombang ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Pada akhirnya, menghadirkan peristiwa-peristiwa memanas karena minimnya respon dari pemerintah, khususnya DPR sebagai bentuk wakil suara rakyat. Dari fenomena tersebut peneliti mengangkat untuk mengidentifikasi masalah yang terletak pada bagaimana media mengkonstruksi wacana mengenai kenaikan tunjangan DPR. Wacana yang dibentuk tidak bersifat netral, tetapi selalu berkaitan dengan kepentingan, posisi sosial, dan relasi kuasa antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana wacana tersebut diproduksi, disebarkan, dan dipahami.

Relevansi masalah ini terletak pada kontribusinya dalam memahami peran media dalam membentuk kesadaran kritis masyarakat. Supaya masyarakat tidak lagi menerima informasi begitu saja (Azmah et al., 2023). Dengan menganalisis pemberitaan kenaikan tunjangan DPR, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana legitimasi kekuasaan dijalankan, bagaimana kritik masyarakat direpresentasikan, dan bagaimana media dapat memperkuat atau melemahkan posisi publik dalam diskursus politik. Selain itu, kajian ini relevan karena menyentuh isu aktual yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Hal tersebut sesuai dengan kajian teori Analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough (Sasmitha, 2023). Analisis wacana kritis adalah salah satu kajian dalam Analisis

wacana. Dalam analisis wacana kritis adalah kajian ilmu yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah teks dan ujaran, dalam lingkup kecil maupun luas (Erawati et al., 2022). Maka, dalam analisis wacana kritis terciptanya relasi kuasa dalam teks yang memiliki kekuasaan ideologi dan diartikan secara tekstual (berkaitan dengan teks). Kekuasaan ideologi tersebut yang mengendalikan terciptanya kuasa dalam teks, dan ideologi itu juga yang mengendalikan persepsi sosial terhadap teks. Ideologi juga diciptakan oleh kelompok atau individu yang memiliki kuasa. Dengan kata lain menurut Fairclough teks merupakan salah satu praktik penindasan dalam interaksi sosial. Tanpa kita sadari banyak penindasan dalam interaksi sosial yang menggunakan teks. Penindasan dalam istilah Fairclough disebut diskursus. Diskursus bisa berubah-ubah dalam menciptakan teks dalam interaksi sosial dan mengendalikan teks dalam interaksi sosial (Munfarida, 1970). Diskursus atau nama lain jika digunakan dalam praktik pembuatan teks, pengendalian teks, dan persepsi sosial yaitu deduktif. Pendekatan diskursus analisis wacana kritis Fairclough membagi menjadi 3 tradisi, yaitu; analisis teks dalam kajian ilmu linguistik, analisis makro sosial dalam praktik-praktik sosial, dan tradisi interpretatif sosiologis dalam kajian ilmu sosiologi.

Objek analisis wacana kritis merupakan bahasa atau teks itu sendiri. Namun dalam kajian ilmu tidak hanya bahasa atau teks itu sendiri juga konteks-konteks yang menyertai, melatar belakangi, dan yang menciptakannya. Teori analisis wacana kritis Fairclough membagi menjadi 3 dimensi yaitu; teks (*text*) itu sendiri, praktik diskursus (*discourse practice*), dan praktik sosial serta kulturalnya (*sociocultural practice*). Peran AWK dalam menganalisis media adalah bagaimana mengembangkan fakta yang ada di lapangan dengan teks itu sendiri (Samsuri et al., 2022). Maka, peneliti menggunakan teori analisis wacana kritis yang diusung oleh Fairclough dengan tujuan mengembangkan fakta dalam kenyataan di lapangan dengan teks dalam media. Dengan harapan dapat membuktikan adanya ideologi, dan praktik diskursus yang menciptakan, mengendalikan sebuah teks. Pengetahuan Masyarakat dikendalikan oleh seseorang yang memproduksi teks berisi kuasa. Kuasa tersebut digunakan untuk menciptakan pengetahuan yang harus diketahui dan tidak harus diketahui (Mudiawati et al., 2023).

Gap penelitian muncul dari minimnya kajian Analisis wacana kritis yang menyoroti isu kenaikan tunjangan DPR melalui perspektif analisis wacana kritis. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menelaah isu politik dalam konteks wacana pemilu, kebijakan pemerintah, atau isu hukum. Sementara itu, pemberitaan mengenai tunjangan DPR masih jarang dikaji, khususnya dengan pendekatan Norman Fairclough yang menekankan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi (Samsuri et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memperluas cakrawala kajian linguistik kritis di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian terdahulu dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan Analisis Wacana Kritis atau *Critical Discourses Analysis* (CDA) Norman Fairclough untuk memahami bagaimana bahasa membentuk makna, ideologi, dan relasi kuasa dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Maka untuk seterusnya peneliti akan menggunakan istilah CDA dalam penyebutan teori atau kajian terdahulu yang digunakan. Beberapa penelitian menekankan wacana dalam media berita, kampanye politik, aksi demonstrasi, serta media hiburan seperti film dan *stand-up comedy*. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk opini publik, menyampaikan ideologi, serta memperkuat atau menentang kekuasaan tertentu.

Penelitian pertama berjudul Ideologi Penggunaan Istilah-Istilah covid-19 di Berita Online: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough dari Akhmad Samsuri, Widyatmike Gede Mulawarman, dan Yusak Hudiyono dari Universitas Mulawarman. Penelitian ini terbit pada tahun 2022 yang meneliti penggunaan istilah-istilah covid-19 pada berita online dari Bisnis.com, Kompas.com, dan Liputan6.com. Dalam penelitian ini dimensi teks hanya menganalisis makna untuk memaparkan istilah-istilah dari kebijakan dalam covid-19, dimensi wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur teks berbentuk himbuan, informasi, dan edukasi terkait kasus covid-19 dan kebijakan pemerintah. Praktik wacana menunjukkan hierarki sosial atas dan bawah antara identitas pemerintah dan masyarakat, serta praktik sosiokultural menyingkap marginalisasi, dominasi sosial,

dan *social wrong* (tidak seimbangnnya interaksi sosial) akibat kebijakan yang tidak sesuai kondisi masyarakat. Penelitian ini menekankan bagaimana bahasa dalam berita membentuk persepsi publik dan ideologi yang terkandung di dalamnya. Dalam analisis dimensi teks penelitian ini berfokus pada pemakaian konjungsi, diidentifikasi anak kalimat dari setiap data, dan pemaparan makna istilah-istilah kebijakan selama covid-19. Jadi, perbedaan yang ditemukan ialah terdapat perbedaan pemusatan perhatian dalam analisis dimensi teks.

Penelitian kedua terbit pada tahun 2023 oleh Rinda Cahya Mudiawati, Yusak Hudiyono, dan Bibit Suhatmady dari Universitas Mulawarman yang berjudul Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap Bahasa Slogan Aksi Demonstrasi Guru di Samarinda. Penelitian ini menyoroti penggunaan bahasa slogan oleh guru yang menolak penghapusan insentif guru di Samarinda. Analisis tiga dimensi Fairclough mengungkap makna kritis dalam bahasa slogan, yang tidak hanya sebagai protes, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi praktik wacana. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam dimensi teks terdapat analisis struktur yang berfokus pada penggunaan konjungsi, frasa, dan premis. Dalam memaparkan makna fokus ke bahasa slogan yang mengajak masyarakat berpikir kritis terhadap sistem penghargaan dan kesejahteraan serta mempertimbangkan implikasi sosial dan politik yang terkait, begitu pun juga dalam mengidentifikasi implikasi dalam teks. Analisis dimensi wacana menggunakan analisis formasi diskursus, analisis representasi, analisis intertekstual, dan analisis posisi subjek. Analisis dimensi sosiokultural terdapat analisis posisi sosial, praktik sosial, dan perubahan sosial.

Penelitian ketiga, berjudul Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap Jokowi yang menyentil Menteriya Mengenai Kenaikan Harga Minyak Goreng oleh Ariska Erawati, Muhammad Surif, dan Syairal Fahmy Dalimunthe dari Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang terbit pada tahun 2022. Penelitian ini menelaah pemberitaan media terkait teguran Presiden Jokowi terhadap menteriya mengenai kenaikan minyak goreng. Data yang digunakan pemberitaan dari Suara.com dan Liputan.com. Hasil analisis mengungkap fokus berita yang ditunjukkan berbeda, menekankan isu ketidakpedulian menteri terhadap kenaikan

harga minyak goreng dan BBM, serta menunjukkan bagaimana media membingkai wacana tersebut.

Penelitian keempat, berjudul Analisis Wacana Kritis Fairclough dalam Wacana Pilpres 2024 di Instagram @Pinterpolitik oleh Siti Fatimah Nur Azmah, Siti Ansoriyah, dan Ilza Mayumi dari Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dalam jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan pada tahun 2023 yang menekankan strategi politik dalam kampanye presiden. Penelitian ini menyoroti bagaimana teks dan praktik diskursif mempengaruhi opini publik, serta fenomena sosiokultural yang membentuk narasi politik, termasuk strategi calon presiden untuk membangun citra.

Penelitian kelima, berjudul Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Pemberitaan Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Antaranews.com oleh Wulan Permata Sari, Agus Setyonegoro, dan Priyanto dari Universitas Jambi yang terbit pada tahun 2025. Penelitian ini menyoroti representasi bahasa Indonesia, strategi legitimasi kebijakan nasional, dan pembentukan pemahaman publik mengenai posisi bahasa Indonesia di tingkat global. Objek penelitian yang digunakan adalah media Antaranews.com.

Berdasarkan kajian terdahulu ini, dapat disimpulkan bahwa CDA Norman Fairclough efektif digunakan untuk menganalisis wacana dari berbagai media dan konteks, dengan menyoroti ideologi, kekuasaan, dan relasi sosial. Namun, masih terdapat gap penelitian terkait wacana politik kontemporer mengenai kebijakan publik kontroversial, khususnya terkait tunjangan DPR, serta bagaimana media memberitakan dan masyarakat meresponsnya. Gap inilah yang menjadi dasar penelitian ini, sehingga fokus diarahkan pada analisis pemberitaan kenaikan tunjangan DPR melalui perspektif CDA Fairclough dengan menekankan framing media, kritik masyarakat, dan relasi kuasa antara elit politik, media, dan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mencapai hasil dalam bentuk kalimat dan metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan penelitian dengan kalimat yang

jelas. Pendekatan kualitatif memiliki banyak pengertian dari berbagai ahli. Salah satunya yaitu menurut; Koentjaraningrat (1984) penelitian kualitatif adalah penelitian bidang kemanusiaan dengan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah guna mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta, serta hubungan-hubungan antara fakta alam, masyarakat, dan perilaku manusia untuk menemukan pengetahuan terbaru (Pahleviannur et al., 2022). Menurut Noor pengertian dari pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan kajian ilmu yang digunakan untuk menganalisis fenomena, manusia, atau alam (Naurah & Siregar, 2023). Metodologi yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan kajian ilmu analisis wacana kritis milik Norman Fairclough untuk menganalisis objek berita online pada Kompas.com. Dengan tujuan mencapai hasil membuktikan teks, dimensi wacana, dan kultural sosial dalam berita online tersebut. Untuk menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan DPR bahwa terdapat praktik diskursus, ideologi, dan kultural yang dikendalikan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan terhadap reproduksi teks, produksi teks, dan terbitnya teks itu sendiri. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dapat menjelaskan objek penelitian yang berupa teks, mengungkapkan makna fakta di lapangan dengan teks yang diteliti, dan menjelaskan sebab dari fakta dalam teks yang ditangkap secara kontekstual. Teknik pengumpulan data dengan baca, simak, dan catat dengan penyesuaian teori analisis wacana kritis Norman Fairclough pada fakta di lapangan. Sumber data penelitian adalah 3 berita dengan topik Kenaikan Tunjangan DPR yang dikelola oleh Kompas.com.

Tabel Sumber data penelitian

No .	Nomor Data	Judul	Sumber	Tanggal Tayang
1.	Berita 1	Puan: Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta Sudah Dikaji Sebaik-baiknya	Kompas.com	21 Agustus 2025
2.	Berita 2	Mengevaluasi Beban Anggaran Tunjangan DPR	Kompas.com	26 Agustus 2025

3.	Berita 3	Pengamat Politik: Idealnya DPR Tidak Menambah Tunjangan	Kompas.com	30 Agustus 2025

Teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan teori analisis wacana kritis yaitu dimensi teks, dimensi praktis wacana, dan dimensi sosiokultural. Pertama, analisis teks berdasarkan linguistik dengan memperhatikan pemakaian diksi, metafora, gaya penulisan pada berita, framing tokoh dalam teks. Kedua, praktik wacana dilakukan melalui analisis produksi, konsumsi, dan distribusi. Ketiga, praktik sosiokultural dianalisis dengan menggunakan 3 tingkatan level, yaitu situasional, institusional, dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berita 1

A. Dimensi teks

Data 1 “Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Kamis (21/08/2025).

Data 2 “Saya kira *make sense* (masuk akal) lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan enggak dapat karena dapat rumah dinas,” ujar Adies, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Data 3 “Kalau DPR punya *sense of crisis*, memilih prihatin dengan menggunakan fasilitas rumah dinas yang masih bagus akan menjadi pilihan. Sehingga uang tunjangan Rp 50 juta per orang itu diperuntukkan bagi rakyat saja,” ujar Lucius, kepada Kompas.com, Selasa (19/8/2025).

Dari data pertama dan kedua ditemukan diksi yang digunakan oleh Puan dan Adies yaitu “dikaji sebaik-baiknya” dan “*make sense* (masuk akal)”. Dari kedua data tersebut terdapat penggunaan diksi yang cukup signifikan, yakni ungkapan “dikaji

sebaik-baiknya” yang disampaikan oleh Puan Maharani dan frasa “*make sense* (masuk akal)” yang digunakan oleh Adies Kadir. Pilihan kata ini tidak dapat dilepaskan dari strategi wacana untuk membangun citra positif terhadap kebijakan DPR RI. Ungkapan “dikaji sebaik-baiknya” menekankan adanya proses pertimbangan yang mendalam, hati-hati, serta berbasis rasionalitas, sehingga kebijakan yang diambil seolah-olah sudah melalui prosedur formal dan matang. Sementara itu, frasa “*make sense* (masuk akal)” memperkuat representasi legitimasi dengan mengasosiasikan kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar, rasional, dan dapat diterima secara logis oleh publik. Dengan demikian, kedua diksi tersebut tidak hanya berfungsi secara leksikal, tetapi juga membentuk konstruksi makna yang mengarahkan pembaca untuk memahami kebijakan DPR RI dalam bingkai rasionalitas dan legalitas, sekaligus mereduksi potensi kritik terhadap keputusan tersebut.

Sedangkan, pada data ketiga ditemukan dua diksi yang digunakan oleh Lucius dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), yaitu “Kalau DPR punya *sense of crisis*” dan “diperuntukkan bagi rakyat saja”, terdapat nuansa kritik yang kuat terhadap kebijakan DPR RI. Ungkapan “*sense of crisis*” mengandung makna bahwa DPR dianggap tidak memiliki kepekaan terhadap situasi krisis yang sedang dialami masyarakat. Diksi ini membangun oposisi antara realitas yang dihadapi rakyat, yakni tekanan ekonomi, dengan perilaku elit politik yang justru mengambil keputusan yang dianggap tidak berpihak. Sementara itu, frasa “diperuntukkan bagi rakyat saja” menegaskan klaim moral dan ideologis bahwa prioritas anggaran negara seharusnya diberikan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir elit. Kedua diksi tersebut memperlihatkan strategi wacana yang berlawanan dengan narasi DPR, yaitu menghadirkan kerangka wacana keadilan sosial dan empati publik sebagai tandingan terhadap wacana rasionalitas dan legalitas yang dibangun DPR. Dengan cara ini, kritik Lucius tidak hanya sekadar menyampaikan ketidaksetujuan, tetapi juga membentuk alternatif konstruksi makna yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Framing actor terlihat jelas melalui diksi yang digunakan oleh masing-masing pihak. Puan Maharani dan Adies Kadir merepresentasikan DPR RI sebagai aktor

yang rasional dan legal, melalui pilihan kata “dikaji sebaik-baiknya” dan “*make sense* (masuk akal)”. Diksi tersebut membingkai DPR sebagai institusi yang bekerja berdasarkan pertimbangan logis dan prosedural, sehingga kebijakan kenaikan tunjangan diposisikan sebagai sesuatu yang sah dan masuk akal. Sebaliknya, Lucius dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) membingkai DPR sebagai aktor yang tidak peka terhadap krisis dan mengabaikan kepentingan rakyat, melalui diksi “Kalau DPR punya *sense of crisis*” dan “diperuntukkan bagi rakyat saja”. Pilihan kata ini menekankan bahwa DPR kehilangan sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan menegaskan bahwa alokasi anggaran seharusnya ditujukan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat. Lucius sebagai aktor dengan narasi moral dan empati terhadap rakyat. Dengan demikian, terdapat dua konstruksi framing aktor yang menegaskan kontras ideologi; DPR membingkai dirinya sebagai pihak yang rasional, sementara pengamat membingkai DPR sebagai aktor yang tidak peduli terhadap krisis rakyat.

Struktur teks dimulai dengan klaim DPR yang menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan telah “dikaji sebaik-baiknya” dan dinilai “*make sense*”. Klaim tersebut kemudian diikuti dengan penjelasan dan legitimasi yang menekankan aspek rasionalitas, prosedural, serta kebutuhan kelembagaan DPR. Bagian ini membentuk kerangka awal teks yang mengarahkan pembaca untuk melihat kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan sah. Setelah itu, barulah dimunculkan kritik dari masyarakat sipil melalui suara pengamat, aktivis, atau organisasi masyarakat. Kritik ini berfungsi sebagai penyeimbang, namun posisinya yang diletakkan di bagian akhir membuat pembaca terlebih dahulu menerima justifikasi dari DPR. Pola semacam ini menunjukkan bahwa media berusaha memberi ruang pada kedua sisi, tetapi secara tekstual menempatkan otoritas DPR pada posisi dominan sebagai pembuka wacana, sedangkan suara masyarakat hadir sebagai respon tandingan. Hal ini memperlihatkan adanya strategi framing dalam teks yang secara halus membangun legitimasi politik DPR sekaligus menjaga kesan objektivitas media.

B. Dimensi Wacana

Produksi teks pada Kompas.com menampilkan dua perspektif utama yang saling berhadapan, yaitu legitimasi DPR dan kritik publik. Strategi wacana yang

digunakan media adalah menghadirkan kutipan langsung dari aktor kunci, baik pejabat DPR maupun peneliti lembaga masyarakat sipil, untuk memberikan otoritas pada narasi yang dibangun. Kutipan dari pihak DPR seperti Puan Maharani dan Adies Kadir diposisikan sebagai representasi suara resmi lembaga, sehingga memiliki kekuatan legitimasi institusional. Sementara itu, kutipan dari peneliti Formappi seperti Lucius lebih diarahkan untuk merepresentasikan suara kritis masyarakat. Intensitas penggunaan kutipan langsung ini menciptakan kesan seolah media memberi ruang setara bagi kedua belah pihak, namun secara praktik diskursif, narasi DPR ditempatkan lebih dahulu dan dengan porsi penjelasan yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan adanya proses seleksi dan konstruksi teks yang menegaskan otoritas wacana institusional sebelum menghadirkan oposisi. Dengan demikian, Kompas.com tidak hanya menyajikan berita sebagai informasi faktual, tetapi juga berperan sebagai mediator wacana yang mempertemukan dua kepentingan, sekaligus mengarahkan pembaca untuk memahami isu melalui kerangka legitimasi DPR yang kemudian diimbangi dengan kritik publik.

Distribusi berita ini muncul dalam konteks polemik publik yang lebih luas, sehingga tidak hanya dipahami sebagai laporan peristiwa, tetapi juga menjadi bagian dari wacana besar mengenai transparansi dan akuntabilitas DPR di hadapan masyarakat. Penyebaran berita melalui media arus utama seperti Kompas.com memberi ruang bagi isu tersebut untuk memperoleh legitimasi publik sekaligus memperluas jangkauan diskursus. Dalam praktiknya, distribusi teks ini mengikat berita ke dalam perdebatan sosial-politik yang sedang berlangsung, di mana publik mempertanyakan sejauh mana DPR sungguh-sungguh menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi yang berpihak pada rakyat. Dengan demikian, publikasi berita tidak bersifat netral, melainkan turut mengkonstruksi pemahaman sosial tentang citra DPR, baik sebagai lembaga yang berupaya memberi justifikasi kebijakan maupun sebagai pihak yang di kritik karena dianggap kurang responsif terhadap krisis. Proses distribusi ini memperlihatkan bahwa media tidak sekadar menyalurkan informasi, melainkan menjadi agen penting dalam membentuk arus opini publik serta memperkuat agenda diskursus transparansi dan akuntabilitas di ranah demokrasi Indonesia.

Intertekstualitas dalam berita ini terlihat dari penyebutan tujuan dan rujukan pada peristiwa sebelumnya, khususnya frasa “diberlakukan sejak Oktober 2024”, yang menegaskan bahwa isu tersebut bukanlah fenomena baru, melainkan problem yang berulang dalam praktik kebijakan DPR. Penyisipan informasi ini menunjukkan adanya kesinambungan wacana, di mana resistensi publik tidak berhenti pada satu momentum, tetapi terus berlanjut sebagai respons terhadap pola kebijakan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Dengan cara ini, teks berita menghubungkan peristiwa terkini dengan jejak sejarah wacana serupa, sehingga pembaca di arahkan untuk memahami masalah ini dalam kerangka kontinuitas polemik, bukan sekadar insiden yang terpisah. Kehadiran intertekstualitas tersebut memperkuat dimensi kritis pemberitaan, karena menunjukkan bahwa wacana tentang akuntabilitas DPR sudah mengakar dalam ruang publik, dan setiap kebijakan baru cenderung dibaca sebagai kelanjutan dari ketidakpuasan lama yang belum terselesaikan.

C. Dimensi Sosiokultural

Relasi kuasa dalam berita ini memperlihatkan bagaimana DPR berusaha mempertahankan posisi dominannya melalui strategi argumentasi teknis dan rasional, misalnya dengan menekankan aspek harga rumah dinas, jumlah anggota dewan, serta kajian administratif yang dilakukan. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun citra bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar logis dan legal, sehingga layak diterima publik. Namun, masyarakat sipil merespons dengan cara menolak legitimasi itu dan menyoroti kesenjangan moral yang tajam antara kehidupan elit politik dan kondisi ekonomi rakyat. Kritik masyarakat bukan hanya mengarah pada aspek kebijakan, tetapi juga menyinggung dimensi etis dan keadilan sosial, sehingga memperlihatkan adanya pertarungan ideologi dalam wacana publik: di satu sisi pragmatisme elit yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan internal lembaga negara, dan di sisi lain moralitas publik yang menekankan keselarasan kebijakan dengan rasa keadilan serta krisis yang sedang dihadapi masyarakat luas. Pertarungan ideologi ini menunjukkan bahwa bahasa dalam teks berita tidak hanya merekam perbedaan pendapat, tetapi juga menjadi arena perebutan makna tentang siapa yang

berhak menentukan arah kebijakan negara serta bagaimana legitimasi kekuasaan di bangun atau di pertanyakan dalam ruang publik.

Ideologi yang muncul dalam berita ini tampak melalui perbedaan konstruksi wacana antara DPR dan masyarakat sipil. Pada pihak DPR, penggunaan diksi seperti “wajar” dan “masuk akal” merepresentasikan ideologi rasional-birokrasi yang menekankan legalitas, struktur kelembagaan, serta kebutuhan institusional sebagai dasar legitimasi kebijakan. Ideologi ini berupaya menampilkan DPR sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan aturan formal dan pertimbangan teknis, sehingga seolah kebijakan kenaikan tunjangan merupakan sesuatu yang natural dan sah. Sebaliknya, wacana masyarakat sipil yang ditunjukkan melalui ungkapan “tidak punya *sense of crisis*” merepresentasikan ideologi populis-moral yang berfokus pada empati terhadap kondisi rakyat dan krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Ideologi ini menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan menilai kebijakan DPR sebagai bentuk ketidakpekaan elit terhadap penderitaan masyarakat. Pertentangan kedua ideologi tersebut memperlihatkan adanya konflik makna dalam ruang publik: antara birokrasi yang ingin mempertahankan legitimasi struktural dan moralitas publik yang menuntut keadilan serta keberpihakan.

Konstelasi sosial berita ini lahir di tengah situasi ekonomi sulit, ketika masyarakat masih berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketidakpastian ekonomi. Dalam konteks tersebut, kebijakan DPR mengenai kenaikan tunjangan tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis administratif, tetapi juga dimaknai sebagai simbol jarak antara elit politik dan masyarakat. Wacana ini memperlihatkan kesenjangan sosial yang semakin mencolok: di satu sisi elit berupaya menjustifikasi kebutuhan institusionalnya, sementara di sisi lain masyarakat memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan kurangnya empati terhadap realitas krisis. Dengan demikian, berita ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan dinamika sosial yang lebih luas, yaitu ketegangan antara kepentingan negara atau elit dan tuntutan moral masyarakat yang menginginkan keadilan serta keberpihakan.

Jadi, berita ini menampilkan adanya dualisme wacana yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, DPR berupaya mendepolitisasi isu kenaikan tunjangan dengan

menggunakan dalih teknis, legalitas, dan rasionalitas administratif, sehingga tampak seolah-olah kebijakan tersebut merupakan kebutuhan struktural yang wajar. Namun, di sisi lain, masyarakat sipil justru merepolitisasi isu ini dengan menekankan dimensi moralitas dan rasa keadilan sosial, yakni mempertanyakan kelayakan keputusan DPR di tengah krisis ekonomi yang menekan rakyat. Relasi kuasa yang muncul memperlihatkan bagaimana elit politik berusaha mempertahankan legitimasi posisinya melalui narasi birokratis, sementara masyarakat sipil berupaya melawan dominasi itu dengan kritik moral dan solidaritas terhadap rakyat kecil. Pertarungan ideologi ini mencerminkan ketegangan klasik antara elit politik yang berorientasi pada kepentingan institusional dan rakyat yang menuntut keadilan substantif serta keberpihakan.

Berita 2

A. Dimensi teks

Dalam berita kedua, terdapat diksi-diksi tegas seperti “krisis kepercayaan”, “keterputusan dengan rakyat”, “represif”, dan “pagar tinggi” yang berfungsi membangun citra DPR sebagai institusi yang menjauh dari kepentingan rakyat. Penggunaan metafora “pagar DPR” tidak sekadar merujuk pada konstruksi fisik, melainkan menjadi simbol keterasingan dan eksklusivitas wakil rakyat dari masyarakat yang seharusnya diwakilinya. Pilihan bahasa ini menunjukkan strategi retorik media dalam mengonstruksi jarak dan menekankan adanya krisis legitimasi. Dengan demikian, teks bukan hanya menyampaikan informasi faktual, tetapi juga membentuk kerangka interpretasi yang mendorong pembaca untuk melihat DPR sebagai institusi yang semakin tertutup dan kehilangan kedekatan dengan rakyat. Terdapat kalimat aktif seperti “DPR kini lebih sibuk melindungi kenyamanannya” yang memperkuat tuduhan langsung kepada lembaga tersebut. Struktur kalimat aktif ini secara linguistik menunjukkan subjek (DPR) sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga kritik terasa lebih tajam dan sulit dihindari. Penggunaan bentuk aktif juga menegaskan posisi media dalam membangun framing bahwa DPR berperan aktif dalam menciptakan jarak dengan masyarakat, bukan sekadar menjadi objek situasi. Dengan demikian, pilihan struktur kalimat ini memperlihatkan strategi teks untuk menegaskan kritik sekaligus

membangun citra DPR sebagai institusi yang mementingkan diri sendiri di tengah kebutuhan publik.

Gaya penulisan yang digunakan dalam teks ini bersifat argumentatif dengan menghadirkan data dari FITRA serta memperkuat analisis melalui rujukan teori demokrasi dari Dahl dan Mair. Kehadiran data empiris dan teori akademik memberi bobot objektif sekaligus legitimasi pada argumen yang dibangun media, sehingga kritik tidak hanya berbasis opini, melainkan memiliki landasan rasional dan ilmiah. Nada penulisan juga tegas, kritis, dan konfrontatif karena secara langsung menyoroti praktik DPR yang dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi, serta menekankan adanya jurang antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Hal ini menunjukkan bahwa teks tidak berhenti pada penyampaian informasi secara deskriptif, melainkan bersifat persuasif dengan tujuan membangun kesadaran dan mengajak pembaca untuk turut serta mengkritisi DPR.

B. Dimensi wacana

Produksi teks dalam berita kedua disajikan dalam bentuk artikel opini atau editorial yang memberi ruang luas bagi penulis untuk mengekspresikan interpretasi, kritik, dan evaluasi terhadap kebijakan DPR. Pilihan bentuk ini membuat teks memiliki karakter yang lebih tajam dan reflektif dibanding berita *straight news*, karena tujuan utamanya bukan hanya menyampaikan fakta, melainkan mengarahkan opini publik. Sumber wacana yang digunakan berasal dari lembaga independen seperti FITRA, yang tidak berada dalam lingkaran kekuasaan, sehingga memperkuat legitimasi kritik yang dilontarkan. Selain itu, pengutipan teori akademik menambah dimensi otoritas argumentatif, menunjukkan bahwa kritik yang dibangun tidak bersifat emosional, melainkan berdasar pada kajian ilmiah dan demokratis. Dari sisi distribusi, teks ini dipublikasikan di media arus utama yang memiliki jangkauan luas, sehingga memungkinkan pesan kritik dan evaluasi terhadap DPR diterima dan diperdebatkan secara lebih masif oleh masyarakat. Konsumsi teks pun diarahkan pada publik pembaca yang kritis terhadap isu-isu politik, sehingga fungsi wacana ini bukan hanya membangun opini, tetapi juga memperluas kesadaran publik mengenai praktik demokrasi yang sehat.

Konsumsi teks pada berita kedua diarahkan kepada masyarakat umum sebagai pembaca utama, dengan tujuan membentuk kesadaran kritis terhadap perilaku DPR. Melalui pilihan diksi, framing, serta penggunaan data lembaga independen, pembaca diajak untuk melihat kebijakan DPR bukan sekadar sebagai angka kenaikan tunjangan, melainkan sebagai beban baru bagi rakyat yang tengah menghadapi situasi sulit. Dengan demikian, berita ini membalik narasi resmi DPR yang berulang kali menekankan adanya “kajian matang” sebagai dasar kebijakan, lalu menyoroti sisi lain berupa kesenjangan moral dan sosial antara elit politik dengan masyarakat. Pola konsumsi semacam ini menjadikan teks tidak hanya sebagai informasi, tetapi juga instrumen kritik sosial yang memperkuat persepsi publik tentang lemahnya representasi DPR terhadap kepentingan rakyat.

C. Dimensi Sosiokultural

Konteks sosial berita kedua lahir di tengah ketidakpuasan publik yang semakin menguat terhadap DPR, ditandai dengan demonstrasi pada 25 Agustus 2025 serta mencuatnya kasus-kasus etik anggota dewan. Dalam konteks tersebut, isu tunjangan perumahan tidak lagi dipandang sebatas keputusan administratif, melainkan berubah menjadi simbol ketidakadilan sosial yang menegaskan jarak antara elit politik dan masyarakat. Relasi sosial yang ditampilkan menunjukkan ketimpangan yang nyata: DPR digambarkan menikmati fasilitas dan kenyamanan yang tinggi, sementara rakyat justru menanggung beban kesenjangan. Artikel opini ini berfungsi sebagai alat resistensi wacana terhadap hegemoni DPR dengan menghadirkan perspektif tandingan. Ideologi yang dibawa bersifat pro-rakyat, demokratis, dan kritis terhadap elit, sehingga secara langsung menentang ideologi hegemoni kekuasaan yang berusaha melegitimasi kenaikan tunjangan melalui dalih teknis maupun rasional. Dengan demikian, berita ini berperan sebagai *counter-discourse* yang memperkuat suara masyarakat dalam menolak dominasi elit politik.

Berita kedua berperan sebagai *counter-discourse* yang secara tegas menantang wacana resmi DPR. Jika pada berita pertama media masih menampilkan legitimasi DPR melalui argumentasi teknis dan rasional, maka berita kedua justru melakukan proses delegitimasi dengan cara menyoroti krisis kepercayaan, keterputusan DPR dengan rakyat, serta simbol-simbol keterasingan wakil rakyat dari konstituennya.

Dengan gaya penulisan argumentatif dan nada konfrontatif, berita ini membangun posisi ideologis pro-rakyat yang demokratis dan kritis terhadap elit politik. Kesimpulannya, berita kedua memperlihatkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi arena pertarungan wacana, di mana suara masyarakat sipil diartikulasikan untuk melawan hegemoni kekuasaan DPR.

Berita 3

A. Dimensi teks

Pilihan diksi seperti “krisis ekonomi”, “tekanan hidup”, “menutup diri”, “pembiaran”, dan “krisis politik” menegaskan kondisi serius yang dihadapi masyarakat serta menyoroti ketidakpekaan DPR terhadap situasi tersebut. Kontras muncul melalui nada “idealnya mengurangi tunjangan” yang diucapkan pengamat, namun kenyataannya DPR justru “menambah tunjangan”. Kontras ini memperkuat framing ketidaksesuaian moral dan empati DPR dengan kondisi rakyat. Selain itu, emosi masyarakat digambarkan dengan penggunaan kata-kata “marah”, “diabaikan”, dan “gelombang protes” yang memberi efek dramatis sekaligus memperlihatkan eskalasi resistensi publik. Dengan demikian, struktur teks ini membangun citra DPR sebagai aktor yang abai, sementara rakyat sebagai pihak yang menanggung beban dan akhirnya melakukan perlawanan.

Struktur kalimat dalam berita ini didominasi oleh kalimat aktif dengan subjek yang jelas, seperti DPR, Andreas, Puan Maharani, hingga Presiden Prabowo. Pola kalimat aktif ini membuat pesan lebih lugas, langsung, dan memperlihatkan siapa yang bertanggung jawab atas pernyataan maupun tindakan yang dikritisi. Selain itu, kalimat langsung berupa kutipan dari Andreas memberikan kesan otentik, personal, serta memperkuat kredibilitas sumber karena menghadirkan suara pengamat secara nyata, bukan sekadar narasi media. Nada yang digunakan bernuansa kritis sekaligus moralitas, menekankan tuntutan agar DPR memberi teladan dengan mengurangi tunjangan sebagai wujud solidaritas terhadap rakyat. Gaya penulisan bersifat argumentatif dengan menghadirkan contoh konkret, misalnya perbandingan sikap Polda Metro dan Gubernur Sultan di Yogyakarta yang bersedia berdialog dengan massa, sehingga menggarisbawahi lemahnya sikap DPR. Dengan demikian, dimensi teks menunjukkan upaya media menampilkan kritik melalui pilihan struktur kalimat,

kutipan langsung, dan gaya argumentatif untuk membangun citra DPR sebagai institusi yang abai dan kurang peka terhadap situasi rakyat.

B. Dimensi wacana

Produksi teks dalam berita ini berbasis wawancara dengan seorang pengamat politik, yaitu Andreas Pandiangan, sehingga perspektif akademis ditonjolkan sebagai sudut pandang utama untuk mengkritik kebijakan DPR. Penggunaan narasumber tunggal membuat opini kritis Andreas menjadi pusat framing, sehingga wacana yang dibangun lebih tajam, terarah, dan konsisten dalam menyerang legitimasi DPR. Sumber wacana diperkuat dengan referensi pada peristiwa nyata seperti demonstrasi mahasiswa dan pengemudi ojek online, sikap aparat Polda Metro yang membuka ruang dialog, serta contoh tindakan Gubernur Sultan di Yogyakarta yang hadir langsung menemui massa. Strategi ini memperlihatkan bahwa media tidak hanya menghadirkan kritik normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan bukti kontekstual yang relevan, sehingga argumen tampak lebih kredibel dan sulit dibantah. Dengan demikian, dimensi wacana menunjukkan bagaimana praktik produksi teks diarahkan untuk mengkonstruksi DPR sebagai pihak yang gagal memberi teladan, sekaligus mendorong pembaca melihat ada alternatif sikap kepemimpinan yang lebih demokratis dan empatik.

Distribusi dan konsumsi berita ini dilakukan melalui media arus utama Kompas.com yang memiliki jangkauan luas dan kredibilitas tinggi di mata publik. Publikasi di media mainstream ini memperluas legitimasi kritik yang disampaikan, karena framing tidak hanya beredar di kalangan akademis atau aktivis, tetapi juga menjangkau masyarakat umum. Konsumsi berita diarahkan agar pembaca melakukan evaluasi moral terhadap sikap DPR dan pemerintah, terutama dalam hal kepekaan sosial di tengah krisis ekonomi. DPR diposisikan sebagai pihak elit yang abai dan lebih sibuk mengurus kepentingannya sendiri, sementara rakyat digambarkan sebagai pihak yang menanggung beban kebijakan. Kehadiran Presiden Prabowo dalam teks berfungsi sebagai figur otoritas tertinggi yang didesak untuk segera turun tangan, sehingga framing ini tidak hanya menekankan kesalahan DPR, tetapi juga menuntut akuntabilitas pemerintah secara keseluruhan. Dengan begitu, distribusi dan konsumsi teks memperlihatkan peran media dalam mengarahkan opini

publik untuk menilai ulang legitimasi wakil rakyat dan menuntut tanggung jawab politik dari aktor eksekutif.

C. Dimensi sosiokultural

Konteks sosial berita ini muncul di tengah gelombang protes mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol) yang kian meluas, sehingga persoalan tunjangan DPR tidak lagi dipersepsikan sekadar sebagai isu administratif atau teknis, melainkan sebagai krisis politik yang menguji legitimasi wakil rakyat. Relasi kuasa digambarkan timpang: DPR memiliki kuasa struktural, namun gagal menunjukkan responsivitas, sehingga semakin memperdalam jarak dengan rakyat. Sebaliknya, rakyat diposisikan sebagai kelompok yang tertekan oleh kondisi sosial-ekonomi, namun tetap memiliki kekuatan resistensi melalui aksi-aksi protes yang mengartikulasikan penolakan terhadap kebijakan elitis. Media dalam hal ini berfungsi sebagai kanal wacana resistensi, dengan menghadirkan suara pengamat politik sebagai representasi kritik publik. Ideologi yang diusung teks adalah pro-demokrasi partisipatif, menekankan bahwa pejabat publik seharusnya hadir langsung mendengar suara rakyat, bukan sekadar bersembunyi di balik justifikasi rasional-birokratis. Narasi ini menolak elitisasi kekuasaan DPR dan secara bersamaan mendorong akuntabilitas pemerintah, terutama presiden, untuk segera turun tangan menyelesaikan krisis kepercayaan yang semakin dalam.

Berita ketiga berfungsi sebagai *critical discourse* yang memperluas cakupan kritik. Isu yang diangkat tidak lagi terbatas pada persoalan tunjangan DPR, melainkan ditarik ke ranah krisis politik dan krisis kepercayaan publik terhadap negara. Dalam konstruksi ini, DPR tetap digambarkan sebagai lembaga berkuasa, tetapi kehilangan legitimasi karena tidak responsif terhadap aspirasi rakyat. Protes mahasiswa dan ojol dibingkai bukan sekadar sebagai ekspresi ketidakpuasan, melainkan sebagai representasi resistensi sosial terhadap elitisasi kekuasaan. Media memposisikan diri sebagai kanal wacana resistensi dengan menampilkan suara pengamat, sehingga memberi ruang artikulasi bagi kritik publik. Ideologi yang diusung adalah pro-demokrasi partisipatif: menolak dominasi elit DPR dan menuntut akuntabilitas pejabat publik, khususnya presiden, untuk hadir secara langsung mendengarkan rakyat. Dengan demikian, jika berita pertama cenderung melegitimasi DPR, berita

kedua mengkritisi tunjangan DPR, maka berita ketiga menajamkan kritik hingga level krisis kepercayaan terhadap negara dan menyoroti urgensi pemulihan legitimasi politik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pemberitaan daring, khususnya pada Kompas.com, tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, melainkan juga membentuk realitas sosial melalui pilihan bahasa, struktur teks, dan strategi wacana yang digunakan. Oleh sebab itu, berita perlu dipandang sebagai konstruksi makna yang sarat ideologi dan relasi kuasa, bukan sebagai representasi fakta yang sepenuhnya netral. Keputusan analisis ini mengarahkan pembaca untuk bersikap kritis ketika mengonsumsi berita daring. Jika tujuan pembaca adalah memperoleh informasi cepat dan aktual, Kompas.com dapat dijadikan rujukan utama. Namun, jika yang dicari adalah pemahaman yang objektif, sebaiknya pembaca tidak berhenti pada satu sumber saja, melainkan menimbang wacana dari berbagai media dan memperhatikan potensi bias yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pembaca memiliki kendali penuh untuk memutuskan: apakah menerima konstruksi wacana media sebagaimana adanya, atau membandingkan serta mengkritisnya demi memperoleh gambaran yang lebih utuh dan berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmah, S. F. N., Ansorih, S., & Mayumi, I. (2023). Analisis Wacana Kritis Fairclough dalam Wacana Pilpres 2024 (Studi Kasus Berita di Instagram @Pinterpolitik). *J-P3K: Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi, Dan Kesehatan*, 4(2), 45–53.
- Erawati, A., Surif, M., & Dalimunthe, S. F. (2022). Analisis Wacana Kritis Nourman Fairclough terhadap Jokowi yang Menyentil Menteri Kenaikan Harga Minyak Goreng. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10653–10662. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4114>
- Mudiawati, R. C., Hudiyono, Y., & Suhatmady, B. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap bahasa slogan aksi demonstrasi guru di Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(3), 739–762. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i3.694>

- Munfarida, E. (1970). Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>
- Naurah, N. Z., & Siregar, R. K. (2023). Wacana Kesetaraan Gender dalam Keluarga pada Film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini : Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 19–35. <https://doi.org/10.35912/jahidik.v3i1.2233>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Pradina Pustaka*.
- Samsuri, A., Mulawarman, W. G., & Hudiyono, Y. (2022). Ideologi Penggunaan Istilah-Istilah Covid-19 di Berita Online: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(3), 603–618. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i3.442>
- Sasmitha, N. W. D. (2023). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Stand-Up Comedy Mamat Alkatiri pada Program “Somasi.” *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 44–58. <https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.44-58>